

ABSTRAK

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan merupakan Undang-Undang yang dalam menerapkan kebijakan hukumnya berdasarkan pidana yang dilanggarnya. Dalam hal ini tindak pidana perusakan hutan berupa penebangan liar, kebakaran hutan, pembalakan liar atau Illegal Logging sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Barang sitaan yang kemudian diserahkan kepada pihak perhutani untuk dijadikan barang bukti dalam persidangan di pengadilan, atau dapat pula berupa penjara yang menjadikan pelaku tindak pidana perusakan hutan merasa jera dan tidak akan mengulangnya lagi. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian disertasi ini adalah (1) Bagaimana kebijakan hukum dalam penanganan pemberantasan perusakan hutan saat inikan kelemahan-kelemahannya yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan kehutanan? (2) Mengapa kebijakan hukum dalam penanganan pemberantasan perusakan hutan yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan kehutanan belum berbasis nilai keadilan? (3) Bagaimana rekonstruksi kebijakan hukum dalam penanganan pemberantasan perusakan hutan yang berbasis nilai keadilan?.

Terkait dengan tema penelitian, maka penelitian ini adalah berupaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang rekonstruksi pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang berbasis nilai keadilan. Diskriptif analitis ini adalah menggambarkan sesuatu keadaan hukum seperti apa adanya dengan paradigma kritis atau kritik (*critical theory*), kemudian dituangkan dalam suatu pembahasan yang logis, sistematis dan komprehensif. Pendekatan penelitian menggunakan *social research* dipilih untuk melihat efektifitas hukum dalam mensejahterakan masyarakat khususnya pada nilai-nilai keadilan. Hukum tidak hanya dilihat dari segi efektifitasnya saja tetapi dikaitkan dengan faktor-faktor non hukum seperti lembaga terkait dengan masalah keadilan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) kebijakan hukum pencegahan pemberantasan perusakan hutan telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik vonis penjara maupun sanksi/denda serta efek jera bagi si pelaku. Adapun kelemahan penegakan hutan perusakan hutan adalah objek penegakan hukum sulit ditembus, lemahnya koordinasi antar penegak hukum, masalah pembuktian, ruang lingkup tindak pidana yang masih sempit, rumusan sanksi pidana, subjek atau pelaku tindak pidana, proses penyitaan, ganti kerugian ekologis dan proses peradilan. (2) Kebijakan hukum pencegahan pemberantasan perusakan hutan belum berkeadilan karena adanya tantangan-tantangan, yaitu tantangan struktural, tantangan formal, tantangan substansial, tantangan kultural dan tantangan multi dimensional, dan (3) Rekonstruksi dari kebijakan hukum pencegahan pemberantasan perusakan hutan dibuat untuk menciptakan suatu perdamaian dan menjamin kesejahteraan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sesuai dengan Pancasila sila ke-5.

Kata kunci : Kebijakan Hukum, Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan, Keadilan.

ABSTRACT

The legislation of the Republic of Indonesia number 18 Year 2013 on prevention of forest Destruction is the eradication of laws that in implementing the policies of the ruling based on a criminal is not allowed. In this case the criminal acts of destruction of forests in the form of illegal logging, forest fires, illegal logging or Illegal Logging in accordance with the applicable provisions. Goods confiscated which is then submitted to the Forestry Department to be used as evidence in proceedings in the Court, or may be a prison made the perpetrators of criminal acts of destruction of forests feel wary and will not repeat it again. The issues examined in this dissertation research are (1) How the policy of the law in handling the eradication of the current destruction of forests and kelemahan-kelemahannya with regard to the environmental sustainability of forestry? (2) why the policy of the law in handling the eradication of destruction of forests with regard to the environmental sustainability of forestry has not based the value of Justice? (3) How the reconstruction of legal policy in the handling of the eradication of destruction of forests based values of Justice?.

Related to the theme of the research, then the research is attempting to describe and analyze about the reconstruction of prevention and eradication of destruction of forests based values of Justice. The analytical Diskreptif this is describing something State law as it is with the paradigm of critical or criticism (critical theory), then poured in a discussion of the logical, systematic and comprehensive. Research using social research approach was chosen to look at the effectiveness of the law in society prosper, especially at values of Justice. The law not only views in terms of their effectiveness, but is associated with factors such as the legal institution of non-related justice issues.

The results of this study concluded that (1) the legal prevention policy of eradication of destruction of forests have been regulated in the legislation of the Republic of Indonesia number 18 Year 2013 in accordance with the provisions of the applicable sentencing or imprisonment penalties/fines as well as deterrent effect for the perpetrators. As for the weakness of the rule of the jungle forest destruction is the object of law enforcement hard penetrated, weak law enforcement coordination, problems of proof, the scope of a criminal offence which is still narrow, the outline of criminal sanctions, the subject or the perpetrator of a criminal offence, the process of foreclosure, ecological damages and a judicial process. (2) preventive legal policy for the eradication of destruction of forests has not been equitable because of the challenges, namely the structural challenge, a formal challenge, the challenge of subtansial, cultural challenges and the challenges of multi dimensional, and (3) The reconstruction of the legal policy of prevention of forest destruction eradication made to create a peace and ensure the wellbeing and social justice for all the people of Indonesia, in accordance with the principles of Pancasila.

Keywords: legal policy, prevention of forest Destruction, Eradication of Justice.